

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut Todaro (1998). Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad dalam Yasa dan Arka 2015).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu (1) lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir (2) tingkat pendidikan (3) tingkat kehidupan yang layak, Mirza (2012). Indeks Pembangunan Manusia telah memainkan dua peran kunci dalam bidang pembangunan ekonomi yang diterapkan: (1) sebagai alat untuk mempopulerkan pembangunan manusia sebagai pemahaman baru tentang kesejahteraan, dan (2) sebagai alternatif untuk PDB perkapita sebagai cara untuk mengukur tingkat pembangun

an untuk perbandingan antar negara dan antar waktu (Elizabeth dalam Yasa dan Arka 2015).

Laporan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2015 yang dikeluarkan Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP) menyatakan Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684 berdasarkan beberapa indikator, yaitu angka harapan hidup, harapan tahun bersekolah, dan pendapatan nasional bruto. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia berada ditingkat medium atau menengah. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami kenaikan 44,3 persen (UNDP; 2015).

Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999, mengubah orientasi Pemerintah daerah dari pertanggungjawaban secara vertical menjadi horizontal. Perubahan tersebut mengakibatkan daerah harus memberi porsi yang lebih besar dari mitra kerja (*stakeholder*) di daerahnya, seperti DPRD, LSM, Perguruan tinggi, asosiasi dan lain-lain dalam menentukan kebijakan porsi yang besar bagi daerah yang mengelola keuangan daerahnya. Ini berarti tanggungjawab menggali sumber-sumber keuangan daerah dan memanfaatkan penerimaan daerah (belanja daerah) lebih banyak berada di daerah.

. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota ini tentu saja memiliki berbagai

persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pendapatan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.

Nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013 sampai 2015. Pada tahun 2013 nilai Indeks Pembangunan Manusia tertinggi ada pada Kota Surakarta dengan angka 0,79 sedangkan Kabupaten yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia terendah adalah Kabupaten Brebes dengan angka 0,70. Untuk tahun 2014 Indeks Pembangunan Manusia tertinggi ada pada Kota Salatiga dengan angka 0,80 dan terendah adalah Kabupaten Pemasang dengan angka 0,62. Selanjutnya untuk tahun 2015 nilai Indeks Pembangunan Manusia tertinggi dimiliki oleh Kota Salatiga dengan angka 0,81 dan terendah adalah Kabupaten Brebes dengan angka 0,63 (BPS, Jawa Tengah 2015).

Dari data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk miskin di Jawa Tengah dari tahun ketahun berfluktuatif hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan manusia yang belum merata, sehingga diperlukan beberapa program untuk meminimalisasi tingkat fluktuasinya dan dengan demikian pembangunan manusia dapat lebih stabil. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak

mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capain IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik.

Peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia juga dapat berpengaruh melalui realisasi belanja Negara dalam pelayanan publik. Peran pemerintah dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi (Mirza,2012).

Kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tercermin dari alokasi anggarannya Swandewi (2014). Dana perimbangan dalam hal ini di turunkan pemerintah yang berfungsi untuk mendanai kebutuhan masing-masing daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di daerah, sesuai dengan UU No.33 tahun 2004 pemerintah daerah memiliki sumber- sumber penerimaan terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, 3) Pinjaman Daerah, dan 3) Lain-lain Penerimaan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah . Terdapat penelitian tentang dana perimbangan,pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Swandewi (2012) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Mirza (2012) dalam penelitiannya tentang pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi,dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009.

Yasa dan Arka (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah terhadap kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali.Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Disparitas Pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali.

Melihat adanya keterkaitan antara dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan antar daerah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang dinyatakan pada penelitian sebelumnya, maka dari itu penelitian ini berusaha mengetahui pengaruh dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Yasa dan Arka (2015) yang meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat dengan objek penelitian kota dan kabupaten di provinsi Bali tahun 2001-2012. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian, objek penelitian dan penambahan variabel dana perimbangan.

.Dengan adanya perbedaan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali tahun 2015 yaitu 73,27 dan angka tersebut masuk dalam kategori tinggi (70-80) sedangkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 hanya masuk dalam kategori sedang (60-70) dengan Indeks Pembangunan Manusia 69,49 BPS (2015). Maka peneliti termotivasi untuk mengetahui seberapa besar Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Alasan penambahan variabel dana perimbangan adalah untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 29 kabupaten dan 6 kota. Dalam beberapa penelitian menemukan hasil dana perimbangan

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat seperti dalam penelitian Swandewi (2014) mendapatkan hasil dana perimbangan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian dari Jayastra,dkk (2015) dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan beberapa hasil penelitian,sehingga penambahan variable dana perimbangan tepat untuk di gunakan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah disparitas pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat dijadikan sebagai pengembangan literatur akuntansi sektor publik.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bagian dari kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai bahan acuan, petunjuk dan masukan dalam menjalankan perekonomian.